

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MEMODERASI PENGARUH KINERJA KAPASITAS FISKAL DAERAH DAN SiLPA PADA DAYA SAING DAERAH

A A Ngr Mayun Narindra¹
I Ketut Jati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: mayunnarindra@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja kapasitas fiskal daerah yaitu Dana Bagi Hasil dan SiLPA diduga tidak linear pengaruhnya pada Daya Saing Daerah karena adanya faktor-faktor kontinjensi, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja kapasitas fiskal daerah pada daya saing daerah serta kemampuan IPM memoderasi pengaruh kinerja kapasitas fiskal daerah pada daya saing daerah.

Penelitian dengan lingkup 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu amatan 2008-2013 menggunakan data kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data sekunder dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Data telah diuji dan memenuhi uji asumsi klasik serta uji kesesuaian model dengan adjusted $R^2=46\%$, kemudian dilakukan uji hipotesis penelitian menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja kapasitas fiskal daerah yaitu DBH dan Indeks Pembangunan Manusia, berpengaruh positif dan signifikan pada Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. IPM mampu memoderasi pengaruh DBH dan SiLPA pada Daya Saing Daerah

Kata kunci: DBH, SiLPA, IPM, Daya Saing Daerah

ABSTRACT

The performance of the region fiscal capacity is Revenue Sharing Fund and SiLPA might not linearly impact the zone competitiveness because they are some contingency factors, which one of them is Human Development Index (HDI). This study aims to discover the influence of region fiscal capacity performance to area competitiveness, also the ability of HDI to modernize the influence of region fiscal capacity performance for zone competitiveness.

An examination with eight regencies and a city in Bali province within 2008-2013 period of study, were using quantitative and qualitative data with a secondary source from Financial Bureau of Bali province and Statistic Center. The data had been tasted and fulfilled the classical assumption testing; suitability model testing with adjusted $R_2=46\%$, afterwards the research of hypothesis testing has finally done by using Moderated Regression Analysis technique.

The result of the test states that the region fiscal capacity performance is Revenue Sharing and Human Development Index, those two aspects give a positive and significant impact on zone competitiveness of regency or city in Bali province. Also, the HDI is capable to modernize the influence of Revenue Sharing Fund and SiLPA on Zone Competitiveness.

Keywords: Revenue Sharing Fund, SiLPA, Human Development Index, Zone Competitiveness

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sudah tentu negara diwajibkan memiliki daya saing yang tinggi. Seperti yang kita ketahui Indonesia sebagai “Macan Asia” dituntut untuk mampu mengelola, baik itu dari sumber daya manusianya maupun sumber daya alam, hal ini bertujuan agar supaya peningkatan daya saing daerah tersebut dapat tercapai. Namun menurut laporan tahunan dari World Economic Forum (WEF) peringkat Indonesia mengalami penurunan, awalnya dari peringkat 46 (2011/2012) turun menjadi peringkat 50 di (2012/2013). Kondisi ini bukan saja memprihatinkan tetapi sudah merupakan ancaman serius terutama jika dikaitkan dengan diberlakukannya era perdagangan bebas ASEAN 2015. Turun dan/atau rendahnya daya saing nasional merupakan cerminan dari kondisi daya saing daerah, dan sudah tentu pemerintah daerah/pemda yang berperan penting juga harus ikut bertanggungjawab membenahinya. Seperti yang ditekankan oleh Ketua DPD RI, Irman Gusman (2012), yang menekankan bahwa pemda memiliki peranan penting dalam mengembangkan daya saing daerah agar mampu meningkatkan daya saing nasional.

Kinerja daya saing daerah yang kurang baik ini menjadi preseden buruk bagi efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional melalui penguatan otonomi daerah. Seperti kritik yang disampaikan oleh Sudarsono Hardjosoekarto (2012), bahwa sampai dengan menjelang sewindu implementasi UU 32 tahun 2004, masih sangat sedikit pihak yang menyadari pentingnya implementasi Pasal 2 ayat 3 UU 32 tahun 2004 yaitu

tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk menciptakan daya saing daerah yang senantiasa meningkat, melalui peningkatan pelayanan umum, masyarakat yang sejahtera.

Penerapan desentralisasi fiskal mengharuskan setiap daerah untuk bisa mengelola keuangan daerahnya sendiri baik dari pengeluaran maupun pemasukannya, namun pada kenyataannya tidak semua daerah mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik, yaitu dengan memaksimalkan PAD. Hal ini terjadi karena kemampuan tiap daerah untuk menyediakan pendanaan berbeda-beda, dapat dilihat dari kemampuan untuk mengolah potensi SDM, serta SDA, tiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Hal ini bertujuan agar supaya daerah mampu meningkatkan daya saing daerahnya dengan cara memaksimalkan segala potensi yang dimiliki daerahnya sendiri.

Adanya ketimpangan kemampuan daerah untuk mendanai daerahnya sendiri mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan daerah. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan fiskal daerah dengan memberikan insentif fiskal. Kemudian untuk menunjang penerimaan dana di setiap daerah pemerintah pusat memberikan dana bantuan yang disebut dengan dana perimbangan. Bersumber dari APBN dana perimbangan berfungsi untuk membantu daerah mendanai kebutuhan daerah dalam menjalankan program desentralisasi. Adapun Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana perimbangan yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah.

Ketimpangan antar daerah terjadi karena ketidakselarasan pembagian dana melalui bagi hasil. Sugiardi (2013) menyatakan hanya daerah tertentu saja yang

memiliki potensi pajak dan sumber daya alam yang besar. PAD dan bantuan pemerintah pusat diharapkan dapat dikelola secara bijak dan dialokasikan secara efektif, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Ketidak efektifan desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan isu cukup sentral. Khusaini (2006) memetakan hal-hal apa saja yang harus difokuskan oleh pemerintah, yaitu 1) Pengalokasian APBD di Indonesia pada era desentralisasi fiskal yang masih jauh dari aspek transparansi, 2) Hasil survei GDS (*governance decentralization survey*) pada tahun 2002 menjelaskan bahwa adanya isu korupsi (KKN) dan berbagai pungutan liar di era desentralisasi semakin besar dan terbanyak justru melibatkan para elit eksekutif di daerah (tertinggi bupati/walikota, disusul oleh Bappeda, dan DPRD), 3) Hasil survei tersebut juga mencatat bahwa hanya 40% masyarakat mempersepsikan pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih baik di era desentralisasi, 50% mempersepsikan sama saja, dan 15% sisanya ternyata mempersepsikan lebih jelek, 4) Adanya pengadaan mobil dinas dan misalnya pembuatan pasar serta terminal sebagai fasilitas umum yang tidak terlalu mendesak atau manfaatnya tidak maksimal guna meningkatkan ekonomi daerah.

Daerah diberikan kewenangan yang besar dalam kebijakan desentralisasi fiskal untuk mengatur keuangan daerahnya sendiri serta diberikannya stimulus transfer dana perimbangan yang dimaksudkan agar daerah mampu mengatasi ketimpangan infrastruktur fiskal daerah. Seiring dengan kebijakan desentralisasi fiskal ini maka kinerja kapasitas fiskal daerah pun meningkat. Namun, efektivitas peningkatannya nampak belum sejalan dengan tujuan kebijakan desentralisasi

fiskal, setidaknya, dapat dilihat dari kondisi daya saing daerah. Oleh karenanya studi tentang dampak kinerja kapasitas fiskal daerah terhadap DSD mendesak dilakukan terutama untuk memperoleh bukti empiris signifikan dan tidaknya pengaruh meningkat kinerja kapasitas fiskal daerah terhadap daya saing daerah.

Seiring dengan kebijakan desentralisasi fiskal ini maka kinerja kapasitas fiskal daerah pun meningkat. Namun, efektivitas peningkatannya nampak belum sejalan dengan tujuan kebijakan desentralisasi fiskal, setidaknya, dapat dilihat dari kondisi daya saing daerah. Oleh karenanya studi tentang dampak kinerja kapasitas fiskal daerah terhadap DSD mendesak dilakukan terutama untuk memperoleh bukti empiris signifikan dan tidaknya pengaruh meningkat kinerja kapasitas fiskal daerah terhadap daya saing daerah.

Disamping kapasitas fiskal daerah, faktor lain yang menjadi sumber pembiayaan dalam rangka penyediaan berbagai fasilitas publik untuk meningkatkan daya saing daerah adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA dapat terjadi apabila dalam anggaran terdapat selisih lebih penerimaan serta pengeluaran, dan biasanya terjadi dalam satu periode. SiLPA sebagai indikator dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan timbul pelampauan target penerimaan daerah, sangat diharapkan sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Secara normatif, semakin meningkatnya kinerja kapasitas fiskal daerah dan SiLPA maka pemda memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan program-program kerjanya dan sudah tentu termasuk program kerja dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

Namun, dengan adanya realitas daya saing daerah yang kurang baik di saat meningkatnya kinerja kapasitas fiskal daerah dan SiLPA berarti upaya peningkatan kinerja kapasitas fiskal daerah ini tidak serta merta/linear mampu meningkatkan daya saing daerah atau dengan kata lain ada faktor kontinjensi yang berperan di dalamnya, salah satunya yang patut diduga adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan suatu indikator yang digunakan dalam penelitian ini dimana mencakup usia hidup, pengetahuan dan kehidupan layak. Apabila suatu daerah mampu mengelola IPM dengan baik maka dapat dipastikan sumber daya alam dan manusianya akan dapat bersinergi dengan simultan. Hal ini akan memicu peningkatan daya saing daerah di setiap daerahnya, karena apabila SDM di setiap daerah diberdayakan dengan baik maka otomatis SDM tersebut mampu mengolah dan mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Hal ini tentu saja dapat terwujud apabila pemerintah mampu memberikan fasilitas dan infrastruktur yang baik sebagai wadah masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya masing-masing yang dimana nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi daya saing masyarakat serta daya saing daerah.

Dalam penelitian ini IPM dijadikan sebagai variabel pemoderasi karena selain sebagai variabel yang mampu meningkatkan pengaruh KKFD (DBH) dan SiLPA, IPM juga dapat dikatakan sebagai variabel yang sangat berpengaruh langsung terhadap daya saing daerah. Seperti penjelasan diatas apabila daerah mampu mengelola IPM dan SDM yang ada maka otomatis keduanya akan bersinergi dengan baik dan nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah..

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan antar wilayah di setiap waktunya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada penurunan atau peningkatan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2012 Setyowati dan Suparwati meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap IPM dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian tersebut menunjukkan PAD, DAU, dan DAK terbukti berpengaruh positif terhadap IPM. Selanjutnya, Lugastoro (2013) menemukan hanya PAD dan DAK positif pengaruhnya pada IPM, lalu DAU memiliki pengaruh negatif. Sebaliknya penelitian Harahap (2010) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu DAU, DAK tidak berpengaruh terhadap IPM.

Terjadinya kontradiksi atau perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel moderasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel moderasi terhadap variabel KKFD (DBH) dan SiLPA serta IPM pada daya saing daerah. Selain itu juga untuk mengetahui kemampuan IPM memoderasi dan nantinya apakah pengaruhnya dapat meningkatkan ataupun menurunkan pengaruh variabel DBH dan SiLPA pada DSD.

Tingginya IPM ini sangat patut diduga mampu meningkatkan pengaruh KKFD (DBH) dan SiLPA pada daya saing daerah. Kemudian dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya banyak terjadi inkonsistensi hasil penelitian, serta variabel IPM lebih banyak digunakan sebagai variabel dependen (terikat).

Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh IPM terhadap KKFD (DBH) dan SiLPA apabila dijadikan sebagai variabel pemoderasi. Apakah nantinya pengaruh IPM positif ataupun sebaliknya yaitu pengaruh IPM adalah negatif akan terlihat saat pembahasan hasil penelitian ini dilakukan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, pertama, penelitian ini ingin mengetahui pengaruh KKFD (DBH) dan SiLPA pada daya saing daerah seperti yang sudah dijelaskan peneliti sebelumnya. Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin mengetahui kemampuan IPM memoderasi pengaruh KKFD (DBH) dan SiLPA pada daya saing daerah. Kiranya, urgensinya dan perbedaaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada pengembangan ilmu, riset, dan praktis.

Sesuai dengan penjelasan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; apakah KKFD (DBH) dan SiLPA berpengaruh pada Daya Saing Daerah?; serta apakah IPM mampu memoderasi pengaruh KKFD (DBH) dan SiLPA pada Daya Saing Daerah?.

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut; untuk mengetahui pengaruh KKFD (DBH) dan SiLPA pada Daya Saing Daerah serta untuk mengetahui apakah IPM mampu memoderasi pengaruh KKFD (DBH) dan SiLPA pada Daya Saing Daerah.

Kontribusi yang diamana ada dua yaitu teoritis dan praktis adalah tujuan dari penelitian ini. Memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemampuan IPM dalam memoderasi pengaruh KKFD dan SiLPA pada

DSD merupakan kontribusi penelitian ini dari segi teoritis. Selain itu hasil penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori, karena jika variabel moderasi dalam penelitian ini terbukti mampu memoderasi pengaruh positif peningkatan KKFD (DBH) terhadap DSD maka hal ini juga berarti perlu adanya revitalisasi teori federalisme fiskal, dan teori keagenan karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak selamanya KKFD berpengaruh langsung terhadap DSD karena ada faktor lain atau faktor kontinjensi yang dapat memperkuat pengaruh langsung KKFD (DBH) terhadap DSD. Adapun dari segi praktis yaitu membantu pemda untuk menyusun kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan DSD melalui KKFD (DBH) serta sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna meningkatkan KKFD dengan mengelola komponen-komponen dari KKFD itu sendiri yaitu DBH, serta dengan adanya SiLPA semakin menjadi faktor yang berpengaruh dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan DSD.

Osoro, (2003) dalam Khusaini, (2006) menyatakan desentralisasi yaitu daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat atau dilimpahkannya wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah bawahnya. Kemudian dibagi menjadi beberapa tipe desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. Teori keagenan merupakan teori dimana hubungan keagenan dianggap sebagai sebuah perjanjian atau kontrak antara prinsipal dan agen, yang dimaksudkan untuk melakukan jasa dengan melimpahkan wewenang dalam pembuatan keputusan yang terbaik untuk prinsipal itu sendiri. Teori kontinjensi merupakan teori yang membahas berbagai aspek kepemimpinan diterapkan pada

situasi tertentu saja tidak untuk situasi lain. Dalam teori kontinjensi ada deskriptif dan preskriptif. Teori kontinjensi deskriptif menjelaskan tentang perbedaan perilaku seorang pemimpin dalam satu situasi dengan situasi lainnya. Kemudian dari segi perspektif menurut Yukl, (2010:277), teori kontinjensi menjelaskan tentang perilaku yang paling tepat dilakukan dalam setiap jenis situasi yang berbeda. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang saling bertentangan mengenai hubungan PAD, DAU, dan DAK pada IPM. Penelitian Setyowati dan Suparwati (2012) dimana PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh positif pada IPM dengan pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sedangkan hasil studi Lugastoro (2013) PAD dan DAK positif signifikan pengaruhnya terhadap IPM sedangkan DAU sebaliknya yaitu negatif signifikan pada IPM. Di sisi lain Harahap (2010) dengan penelitiannya yang serupa menunjukkan IPM tidak dipengaruhi oleh DAU dan DAK secara parsial.

Dari hasil-hasil penelitian diatas terlihat hasil yang tidak sama atau inkonsistensi hasil dari peneliti satu dengan peneliti lainnya dapat terjadi karena beberapa faktor lain yang diduga juga memiliki pengaruh antara PAD, DAU, dan DAK pada IPM. Menurut Sugiardi, (2013) adanya variabel moderasi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apabila terjadi kontradiksi atau perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya. Pengaruh dari variabel moderating tersebut dapat bersifat positif maupun negatif dan dapat mengatasi hasil penelitian yang berbeda tersebut dan dengan melalui pendekatan kontinjensi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan evaluasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam hubungan antara PAD, DAU, DAK dan SiLPA

pada IPM. Selain itu teori ini dapat melihat apakah variabel moderasi tersebut berpengaruh positif ataupun negatif terhadap hubungan antara PAD, DAU, DAK dan SiLPA dengan IPM.

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam, DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas: PBB, BPHTB, dan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 (pasal 4, PP No. 55 thn 2005). Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi, dan Pertambangan Panas Bumi (pasal 15, PP No. 55 thn 2005) adalah DBH yang bersumber dari sumber daya alam. Apabila setiap daerah mampu mengelola elemen-elemen dari DBH tersebut maka akan mampu meningkatkan daya saing daerahnya sendiri.

H₁: DBH berpengaruh positif pada daya saing daerah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih anggaran dalam satu periode. Dimana SiLPA dalam satu periode anggaran harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah agar nantinya mampu menghasilkan selisih lebih dimana nantinya digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran di periode berikutnya. SiLPA juga dapat digunakan untuk mengantisipasi pendanaan daerah yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan gejala ekonomi yang tumbuh di dalam masyarakat. Hal tersebut dapat tercipta apabila pemerintah mampu menghemat anggaran belanja daerah dengan mengoptimalkan setiap anggaran yang digunakan untuk peningkatan pelayanan umum, infrastruktur daerah yang dalam usaha daerah meningkatkan daya saing daerah.

Adanya SiLPA diharapkan mampu menalangi difisit anggaran apabila terjadi ketidakselarasan antara pendapatan daerah dengan pengeluaran yang

dlakukan oleh daerah itu sendiri. SiLPA adalah salah satu faktor yang menunjukkan efisiensi pemerintah dalam mengelola pengeluaran daerah. Efisiensi tersebut yang nantinya menjadi surplus pada anggaran daerah dimana kemudian surplus anggaran tersebut dapat digunakan untuk menopang pendanaan daerah pada periode berikutnya. Dapat dikatakan lebih lanjut SiLPA merupakan pendanaan yang nantinya berguna sebagai dana talangan atau dana pembantu anggaran di periode-periode berikutnya, seiring dengan perubahan atau gejolak perekonomian yang terjadi di masyarakat.

H₂: SiLPA berpengaruh positif pada daya saing daerah.

IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur daerah dan pembangunan dalam waktu tertentu serta untuk melihat apakah pemerintah sudah melakukan penyediaan infrastruktur dan pembangunan dengan baik. Peningkatan perekonomian suatu daerah ditentukan dengan seberapa berhasilnya daerah mengelola SDM dan SDA dengan baik, salah satunya dengan IPM. Apabila IPM dapat ditingkatkan dan berjalan dengan selaras maka daerah akan memiliki daya saing yang baik dan nantinya IPM digunakan untuk memantau perbandingan dan perkembangan daya saing tiap daerah dengan melihat pembangunan periode-periode sebelumnya (BPS, 2012a:19).

H₃: IPM berpengaruh positif pada daya saing daerah.

Daerah dituntut memiliki sumber daya manusia yang handal dan mampu memanager sumber-sumber dari DBH tersebut dengan baik guna meningkatkan pendapatan daerah, dan nantinya terlihat daerah mana yang lebih baik dalam pengelolaan DBH. Pemanfaatan DBH akan memperlihatkan bagaimana

kemampuan daerah mengelola sumber daya alam dengan baik dan kemampuan daerah meningkatkan sumber daya manusianya dengan baik. Hal tersebut guna mencapai daerah yang memiliki daya saing daerah yang baik dan berkualitas.

H₄: IPM meningkatkan pengaruh positif DBH pada daya saing daerah.

Agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran daerah sumber daya manusia yang ada di setiap daerah harus mampu meminimalisir pengeluaran-pengeluaran daerah yang tidak terlalu penting. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan SiLPA dan meningkatkan pendapatan daerah. Karena secara normatif, semakin meningkatnya kinerja kapasitas fiskal daerah dan SiLPA maka pemda memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan program-program kerjanya dan sudah tentu termasuk program kerja dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

H₅: IPM meningkatkan pengaruh positif SiLPA pada daya saing daerah

METODE PENELITIAN

Kabupaten/kota di provinsi Bali merupakan fokus dari penelitian ini. Dengan kurun waktu 6 tahun (2008-2013) untuk variabel DBH dan IPM. Kemudian untuk variabel SiLPA kurun waktu yang digunakan adalah dari tahun 2007-2012 atau t-1. Adapun variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah Daya Saing Daerah. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah DBH, dan SiLPA. Kemudian IPM digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

DBH yang bersumber dari sumber daya alam dan dapat berasal juga dari anggaran daerah akan memperlihatkan bagaimana kemampuan daerah mengelola

sumber daya alam dengan baik dan kemampuan daerah meningkatkan sumber daya manusianya dengan baik. Hal tersebut guna mencapai daerah yang memiliki daya saing daerah yang baik dan berkualitas. SiLPA adalah salah satu faktor yang menunjukkan efisiensi pemerintah dalam mengelola pengeluaran daerah. Efisiensi tersebut yang nantinya menjadi surplus pada anggaran daerah dimana kemudian surplus anggaran tersebut dapat digunakan untuk menopang pendanaan daerah pada periode berikutnya. Dapat dikatakan lebih lanjut SiLPA merupakan pendanaan yang nantinya berguna sebagai dana talangan atau dana pembantu anggaran di periode-periode berikutnya, seiring dengan perubahan atau gejolak perekonomian yang terjadi di masyarakat. SiLPA yang menjadi fokus penelitian ini adalah SiLPA tahun 2007-2012.

$$\text{SiLPA} = \text{surplus/defisit} - \text{pembiayaan netto}$$

Harahap (2010) menyatakan bahwa pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia adalah fungsi dari IPM atau *Human Development Index* (HDI). Adediran (2011) menyatakan IPM atau HDI digunakan untuk membagi sebuah negara menjadi apakah negara tersebut negara maju, negara berkembang ataupun negara terbelakang. HDI juga digunakan sebagai alat ukur apakah kebijakan ekonomi berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. IPM yang menjadi fokus penelitian ini adalah IPM tahun 2008-2013. Data IPM diperoleh langsung dari BPS Provinsi Bali sehingga tidak lagi dilakukan perhitungan.

IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur daerah dan pembangunan dalam waktu tertentu serta

untuk melihat apakah pemerintah sudah melakukan penyediaan infrastruktur dan pembangunan dengan baik. Peningkatan perekonomian suatu daerah ditentukan dengan seberapa berhasilnya daerah mengelola SDM dan SDA dengan baik, salah satunya dengan IPM. Apabila IPM dapat ditingkatkan dan berjalan dengan selaras maka daerah akan memiliki daya saing yang baik dan nantinya IPM digunakan untuk memantau perbandingan dan perkembangan daya saing tiap daerah dengan melihat pembangunan periode-periode sebelumnya (BPS, 2012a:19).

Para ahli ekonomi pada umumnya mengartikan daya saing sebagai hasil gabungan dari keunggulan komparatif (*market distortion*), baik yang terjadi karena kebijakan (intervensi) pemerintah maupun karena ketidaksempurnaan pasar (Sharples, 1990).

Oleh karena itu, dapat terjadi suatu produk memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional akibat adanya dukungan kebijakan proteksi (*distortif*) pemerintah, walaupun sebenarnya produk tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif. Sebaliknya dapat pula terjadi, suatu produk memiliki keunggulan komparatif, namun karena tingginya distorsi pasar (tingginya biaya transaksi) menyebabkan produk tersebut menjadi tidak memiliki daya saing (Gonarsyah, 2001).

Arfiantini (2000) mengemukakan bahwa daya saing daerah pada prinsipnya meliputi seluruh potensi daerah yang bersangkutan sebagai modal dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang baik. Terdapat 4 fokus terkait dengan daya saing daerah, yaitu: Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur, Iklim Berinvestasi, SDM (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2008). Untuk fokus kemampuan ekonomi daerah, indikatornya adalah angka konsumsi RT per kapita ($Y_{2.1}$), Nilai Tukar Petani/(NTP ($Y_{2.2}$), Persentase konsumsi RT untuk non pangan ($Y_{2.3}$), produktivitas daerah per sektor (9 sektor) ($Y_{2.4}$). Data daya saing daerah adalah data pada tahun t_1 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 2 yang menggambarkan deskripsi sampel penelitian.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DBH	47	16.878.855.939	160.747.933.310	47874373408,53	40.095.379.216.027
SiLPA	47	24.780.383.971	757.401.951.605	114510394065,51	122.310.698.969.982
IPM	47	65	79	72,09	3,368
DSD	47	0	4	1,17	0,816
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Data Diolah (2015)

- 1) Variabel DBH memiliki nilai terendah sebesar 16.878.855.939 dan nilai tertinggi sebesar 160.747.933.310 dengan nilai rata-rata sebesar 47874373408,53. Standar deviasi untuk DBH sebesar 40.095.379.216.027. Artinya terjadi penyimpangan nilai DBH yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 40.095.379.216.027.
- 2) Variabel SiLPA memiliki nilai terendah sebesar 24.780.383.971 dan nilai tertinggi sebesar 757.401.951.605 dengan nilai rata-rata sebesar 114510394065,51. Standar deviasi untuk SiLPA sebesar 122.310.698.969.982.

Artinya terjadi penyimpangan nilai SiLPA yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 122.310.698.969.982.

- 3) Variabel IPM memiliki *minimum value* sebesar 65,00 dan *maximum value* sebesar 79,00 dengan *mean* atau rata-rata sebesar 72,09. Standar deviasi untuk IPM sebesar 3,368. Artinya terjadi penyimpangan nilai IPM yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 3,368.
- 4) Variabel DSD memiliki nilai terendah yaitu 0,00 dan nilai maximum adalah 4,00, *mean* atau rata-ratanya adalah sebesar 1,17. *Standard deviation* untuk DSD adalah 0,816. Artinya terjadi penyimpangan nilai DSD yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 0,816.

Hasil pengujian model penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan pada tabel, dapat diketahui nilai *p-value* sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$ yang berarti model penelitian ini layak untuk digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Tabel 2.
Fitness Model Test

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11,425	5	2,285	4,876	0,001 ^a
	Residual	19,214	41	0,469		
	Total	30,638	46			

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 3.
Adjusted R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,752 ^a	0,566	0,460

Sumber: Data diolah (2015)

Hasil *Adjusted R²* terlihat pada Tabel 3 diatas yaitu sebesar 46,0% yang berarti bahwa 46% variasi perubahan Daya Saing Daerah dapat dijelaskan oleh DBH, IPM, dan variabel pemoderasinya, sedangkan sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa mayoritas pengaruh variabel yang mempengaruhi Daya Saing Daerah adalah berasal dari variabel lain dan variabel moderasi memiliki prosentase yang lebih kecil, namun tetap mampu mempengaruhi variabel Daya Saing Daerah

Berdasarkan Tabel 4 dibawah ini fungsi dari uji normalitas adalah untuk mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak. Dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,145 > 0,05$ berarti data terdistribusi secara normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,61610455
Most Extreme Differences	Absolute	0,167
	Positive	0,167
	Negative	-0,087
Kolmogorov-Smirnov Z		1,146
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,145

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,634 ^a	0,402	0,309	0,63466	1,866

Sumber: Data Diolah (2015)

Berdasarkan hasil pada Tabel 5 nilai DW= 1,866. Nilai dU untuk jumlah sampel 47 dengan 4 variabel bebas adalah 1,7203 dan nilai dL $(4-dU) 4-1,7203 = 2,280$. Nilai Durbin Watson adalah sebesar 1,866 lebih besar dari batas atas (du) yakni 1,7203 dan kurang dari $(4-du) 4-1,7203 = 2,280$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak.

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DBH	0,271	3,696
SiLPA	0,242	4,124
IPM	0,489	2,044

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat variabel DBH, nilai *tolerance* yaitu $0,271 > 0,1$, VIF sejumlah $3,696 < 10$. Untuk variabel SiLPA $0,242 (> 0,1)$ adalah hasil untuk nilai *tolerance*, VIF yaitu $4,124 (< 10)$. Sedangkan variabel IPM, memiliki *tolerance* sebesar $0,489 > 0,1$ untuk VIF yaitu $2,044 < 10$. Berdasarkan hasil tersebut diatas, seluruh variabel penelitian ini memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 10% (0,1) serta masing-masing variabel memiliki VIF kurang dari 10 maka penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadinya kesamaan varians dari satu amatan dengan amatan lainnya. Hasil dari Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	t	Sig.
(Constant)	-0,806	0,425
DBH	-1,291	0,204
SiLPA	0,618	0,540
IPM	1,219	0,230

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 7, nilai sig. seluruh variabel di atas 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Jadi seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian bebas heteroskedastisitas.

Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel merupakan variabel pemoderasi adalah dengan melakukan uji interaksi. Regresi dengan melakukan uji interaksi antarvariabel disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Analisis MRA diolah dengan bantuan program SPSS dan hasilnya tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8.

Koefisien Beta Variabel Penelitian dan Konstanta

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-50,569	77,723	
DBH	0,0000000002965	0,000	1,543
SiLPA	-0,00000000001287	0,000	-0,204
IPM	0,126	0,049	0,551
DBH_IPM	-2,712	0,814	-2,393
SiLPA_IPM	0,708	0,304	0,669

Sumber: Data diolah (2015)

Uji t atau uji hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dan variabel moderasi secara individual. Nilai signifikansi dari uji hipotesis penelitian (Uji t) harus lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat dilihat dari Tabel 9 hasil uji hipotesis (Uji t) dalam penelitian ini.

Tabel 9.
MRA (*Moderate Regression Analysis*)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-50,569	77,723		0,519	
DBH	0,00000000002965	0,000	1,543	0,049	Diterima
SiLPA	-0,000000000001287	0,000	-0,204	0,535	Ditolak
IPM	0,126	0,049	0,551	0,015	Diterima
DBH_IPM	-2,712	0,814	-2,393	0,002	Diterima
SiLPA_IPM	0,708	0,304	0,669	0,026	Diterima

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 9 tersebut diketahui hasil uji hipotesis penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan pada DSD. Hasil penelitian ini menerima H_1 dalam penelitian ini yaitu DBH berpengaruh positif dan signifikan pada DSD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa SiLPA tidak berpengaruh positif dan signifikan pada DSD. Hasil ini menolak hipotesis H_2 yang menyatakan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada DSD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan pada DSD. Hasil ini menerima hipotesis H_3 yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan pada DSD.

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh DBH pada DSD kabupaten/kota di provinsi

Bali. Hasil ini menerima hipotesis H_4 yang menyatakan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh DBH pada DSD.

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh SiLPA pada DSD kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasil ini menerima hipotesis H_5 yang menyatakan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh SiLPA pada DSD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan pada DSD. Hasil penelitian ini menerima $H_{a.1}$ dalam penelitian ini yaitu DBH berpengaruh positif dan signifikan pada DSD.

Oleh karena DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap DSD maka pemerintah perlu meningkatkan pembagian DBH dan meningkatkan pengawasan terhadap alokasi belanja daerahnya.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa SiLPA tidak berpengaruh positif dan signifikan pada DSD. Hasil ini menolak hipotesis $H_{a.2}$ yang menyatakan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada DSD.

Walapun SiLPA tidak berpengaruh signifikan pada DSD tetapi pengaruh negative SiLPA pada DSD ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari SiLPA kurang dialokasikan pada belanja daerah yang mampu meningkatkan DSD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan pada DSD. Hasil ini menerima hipotesis

Ha.3 yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan pada DSD. Hal ini merupakan kondisi yang sangat kondusif, oleh karena itu program yang berkaitan dengan peningkatan IPM seperti; 1) Tingkat Pendidikan, 2) Kualitas Kesehatan, dan 3) daya beli masyarakat, terus ditingkatkan dan bila perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh DBH pada DSD kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasil ini menerima hipotesis Ha.4 yang menyatakan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh DBH pada DSD.

Oleh karena secara parsial IPM berpengaruh pada DSD dan juga mampu memoderasi pengaruh DBH pada DSD, maka variabel IPM dapat dikategorikan sebagai variabel kuasi moderasi.

Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh SiLPA pada DSD kabupaten/kota di provinsi Bali. Hasil ini menerima hipotesis Ha.5 yang menyatakan bahwa IPM mampu memoderasi pengaruh SiLPA pada DSD.

Oleh karena secara parsial IPM berpengaruh pada DSD dan juga mampu memoderasi pengaruh SiLPA pada DSD, maka variabel IPM dapat dikategorikan sebagai variabel kuasi moderasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Atas dasar dari hasil uji hipotesis diatas serta pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan pada DSD, dimana hal ini dipicu oleh melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki setiap daerah, dan bagaimana pemerintah daerahnya mampu mengelola sumber dayanya dengan baik. SiLPA berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada DSD karena penyerapan anggaran yang kurang optimal dan penggunaan sisa anggaran pemerintah belum dipusatkan untuk peningkatan daya saing daerah. IPM sebagai variabel pemoderasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada DSD dan mampu memoderasi pengaruh DBH dan SiLPA pada DSD. Seperti yang kita ketahui Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap usaha pemerintah meningkatkan daya saing daerahnya. Apabila pembangunan manusia yang terjadi di setiap daerah berjalan dengan baik, maka otomatis jalannya perekonomian di daerah akan berjalan dengan baik pula, karena terjadi keseimbangan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai pelaku yang akan mengelola sumber daya alam tersebut, serta kinerja pemerintahan juga akan meningkat seiring dengan kualitas pembangunan manusia yang terus meningkat.

Dari hasil uji tersebut diatas adapun saran yang dapat diberikan diantaranya:

KKFD (DBH) dan IPM berpengaruh positif dan signifikan pada DSD kabupaten/kota di Provinsi Bali. Oleh karena DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap DSD maka pemerintah perlu meningkatkan pembagian DBH dan meningkatkan pengawasan terhadap alokasi belanja daerahnya. Pemerintah pusat harus mengoptimalkan program-program yang berkaitan dengan

peningkatan IPM seperti; pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat, upaya ini harus ditingkatkan tiap tahunnya.

KKFD (SiLPA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada DSD kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan agar supaya kebijakan DAU tidak hanya terkait dengan formula perhitungan besaran DAU melainkan disertai dengan kebijakan lainnya yang mampu meningkatkan DSD. Walaupun SiLPA tidak berpengaruh signifikan pada DSD tetapi pengaruh negatif SiLPA pada DSD ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari SiLPA kurang dialokasikan pada belanja daerah yang mampu meningkatkan DSD.

REFERENSI

- Adediran, Olanrewaju Adewole. 2011. An Assessment of Human Development Index and Proverty Parameters in the Millennium Development Goals: Evidence from Nigeria. *Crescent University*.
- Adiwiyana, Priya. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anand, Sudhir & Amartya Sen. 2000. The Income Component of the Human Development Index. *Journal of Human Development*, Vol. 1, No. 1.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Prespektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).

- Ardiansyah dan Vitalis Ari Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Balitbangda Provinsi NTT. 2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Litbang NTT*. Vol. 4, No. 3.
- Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). *Tesis* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. MRG@UQ *Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- BPS. 2012a. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Bali*. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- . 2012b. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS* Surabaya.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Davoodi, Hamid. & Heng-fu Zou. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43: 244-257.
- Devas, N & U. Grant. 2003. Local Government Decision-Making-Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Development*, 23:307-316.
- Fauzyny, Wulan. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Fisman, Raymond. & Roberta Gatti. 2002. Decentralization and Corruption: Evidence across Countries. *Journal of Public Economics*, 83: 325-345

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunantara, Putu Candra. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi di Provinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai)*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Harahap, Riva Ubar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Hayek, Friedrich. 1945. The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review*, 35: 519-530.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jumadi., M. Pudjiharjo., Ghozali Maski., Moh. Khusaini. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *IOSR Journal Of Humanities and Social Science*. Vol. 13, Issue 1, pp 01-07.
- Khusaini, Muhammad Dr. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw.
- Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Kusreni, Sri dan Sultan Suhab. 2009. Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 5, No. 3.
- Liana, Lie. 2009. Penggunaan *MRA* dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel *Moderating* terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 14(2), h: 90-97.

- Lugastoro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Martinez-Vazquez, J. & R.M. McNab (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, 31(9), pp: 1597-1616
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*.
- Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.
- Nata Wirawan, I Gusti Putu. 2002. *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistik Inferensia) untuk ekonomi dan bisnis*. Denpasar: edisi kedua, Keraras Emas.
- Pamudi, Septian Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, Bogor.
- Paujiah, Sri Puji. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Universitas Siliwangi.
- Penthury, M.A. 2011. Flypaper Effects Anomaly of West Papua Capital Public Expenditure. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 3(3), pp: 289-297.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2008 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Porter, Michael E., *Competitive Strategy*, Collier Macmilian, 1990.
- Rahyuda. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana-Press.
- Ranis, Gustav, Frances Stewart, & Emma Samman. 2005. Human Development: Beyond the Human Development Index. *Journal of Human Development Index*, Vol. 7, No. 3.
- Rindayati, Wiwiek. 2009. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian, Bogor*.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.10, No.1, hal 103-124.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Pretasi*. Juni 2012. Vol.9, No. 1, ISSN 1441-1497.
- Smoke, P. 2001. Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Current Concepts and Practice. United Nation Research Institute for Social Development. www.worldbank.org/decentralization. Diunduh 31 Agustus 2014.
- Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta.
- Sumiyati, Euis Eti. 2011. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat.
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.
- Syaiful, 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan*.www.bappenas.go.id. Diunduh Diunduh tgl 31-8-2014.

- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h: 142-155.
- Tiebout, Charles M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), pp: 416-424.
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No. 4, Hal. 1677-1686.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Usman, Syaikhu., M. Sulton Mawardi., Adri Poesoro., Asep Suryahadi., Charles Sampford. 2008. Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Laporan Penelitian SMERU.
- Utama, Suyana.2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Vegirawati, Titin. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*. Vol. 2 No. 1.
- Wertianti, I G A Gede. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.
- Wirawan, Nata. 2002. *Statistik Inferensia*. Edisi kedua. Denpasar: Keraras Emas.
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Yudhaningsih, Resi. 2010. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Regional di Indonesia. *Teknis*. Vol. 5 No.1.
- Yukl, Gary. 2010. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Indeks

Yusuf, Ahmad. 2014. Pengaruh Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Perkembangan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.